

**KEDUDUKAN KREDITOR YANG MEMILIKI HAK EKSEKUSI
PERDATA DALAM PELAKSANAAN PERDAMAIAN YANG
DIHOMOLOGASI UNTUK RESTRUKTURISASI PEMBANGUNAN
HUKUM KEPAILITAN INDONESIA**

DISERTASI

Oleh

**AZET HUTABARAT
2107190001**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**KEDUDUKAN KREDITOR YANG MEMILIKI HAK EKSEKUSI
PERDATA DALAM PELAKSANAAN PERDAMAIAAN YANG
DIHOMOLOGASI UNTUK RESTRUKTURISASI PEMBANGUNAN
HUKUM KEPAILITAN INDONESIA**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

AZET HUTABARAT
2107190001



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azet Hutabarat
NIM : 2107190001
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul
“KEDUDUKAN KREDITOR YANG MEMILIKI HAK EKSEKUSI PERDATA
DALAM PELAKSANAAN PERDAMAIAN YANG DIHOMOLOGASI UNTUK
RESTRUKTURISASI PEMBANGUNAN HUKUM KEPAILITAN
INDONESIA”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 01 November 2024



Azet Hutabarat
NIM: 2107190001



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

**KEDUDUKAN KREDITOR YANG MEMILIKI HAK EKSEKUSI
PERDATA DALAM PELAKSANAAN PERDAMAIAN YANG
DIHOMOLOGASI UNTUK RESTRUKTURISASI PEMBANGUNAN
HUKUM KEPAILITAN INDONESIA**

Oleh:

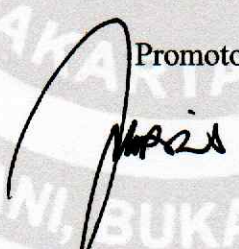
Nama : Azet Hutabarat
NIM : 2107190001
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi / Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Tertutup guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

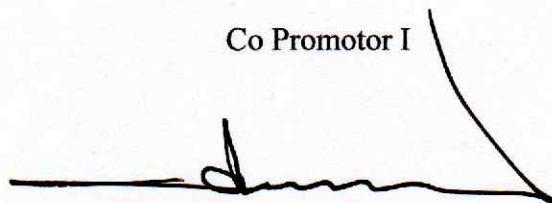
Jakarta, 01 November 2024

Menyetujui,

Promotor

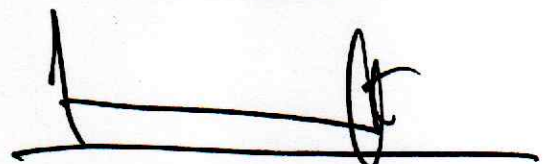

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
NIP/NIDK: 191690/9990463325

Co Promotor I



Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.
NIP/NIDN: 091692/0326106005

Co Promotor II



Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 141103/0304106202



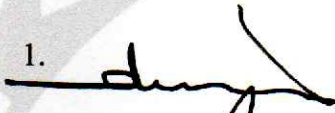
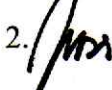
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pada tanggal 01 November 2024 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Azet Hutabarat
NIM : 2107190001
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi / Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “KEDUDUKAN KREDITOR YANG MEMILIKI HAK EKSEKUSI PERDATA DALAM PELAKSANAAN PERDAMAIAN YANG DIHOMOLOGASI UNTUK RESTRUKTURISASI PEMBANGUNAN HUKUM KEPAILITAN INDONESIA” oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Ketua	1. 
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	2. 
3	Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.	Penguji	3. 
4	Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Penguji	4. 
5	Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.	Penguji	5. 
6	Prof. Ir. Roy H.M. Sembel, MBA., Ph.D.	Penguji Eksternal	6. 
7	Dr. Resha Agriansyah, S.H., M.H.	Penguji Eksternal	7. 



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN KREDITOR YANG MEMILIKI HAK EKSEKUSI PERDATA
DALAM PELAKSANAAN PERDAMAIAN YANG DIHOMOLOGASI UNTUK
RESTRUKTURISASI PEMBANGUNAN HUKUM KEPAILITAN INDONESIA**

Nama : Azet Hutabarat
NIM : 2107190001
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi / Bisnis

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 01 November 2024

Mengesahkan,
Universitas Kristen Indonesia

Direktur Pascasarjana UKI



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A.
NIP/NIDN : 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Azet Hutabarat
NIM : 2107190001
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Disertasi
Judul : KEDUDUKAN KREDITOR YANG MEMILIKI HAK EKSEKUSI PERDATA DALAM PELAKSANAAN PERDAMAIAN YANG DIHOMOLOGASI UNTUK RESTRUKTURISASI PEMBANGUNAN HUKUM KEPAILITAN INDONESIA

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 01 November 2024



Azet Hutabarat
NIM: 2107190001



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

SK PENGANGKATAN DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)



Universitas Kristen Indonesia
Program Pascasarjana

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Nomor : 1084/UKLPPS/HKP.03.01/2024

tentang:

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
SEMESTER GASAL TA 2024/2025
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
- b. bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
- c. bahwa untuk pengujian Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Penguji yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
4. Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.

- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
- b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKI.R/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMSETER GASAL TA 2024/2025 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.**
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Oktober 2024

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadcak, M.Pd., PA.
NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Tembusan:

1. Rektor UKI;
2. WRAI, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDH;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Nomor 1084/UKI PPS/HKP/03.01/2024
 Tanggal : 14 Oktober 2024

4.	Jumat, 01 November 2024	09.00 - 11.00 WIB	Azet Husein NIM 2107190001	KEDUDUKAN KREDITOR YANG MEMILILI HAK EKSEKUSI PERDATA DALAM PELAKSANAAN PERDAMAIAN YANG DIHOMOLOGASI UNTUK RESTRUKTURISASI PEMBANGUNAN HUKUM KEPAILITAN INDONESIA	1. Prof. Dr. Dhaniswari K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A. 2. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S. 3. Dr. Bernard Nanggolan, S.H., M.H. 4. Dr. Huhun Panjutan, S.H., M.H. 5. Dr. Hendri Jayadi Pudiangan, S.H., M.H. 6. Prof. Ir. Roy H.M. Sembel, M.B.A., Ph.D. 7. Dr. Resha Agriasyah, S.H., M.H.	Ketua Penguji / Co Promotor 1 Sekretaris / Promotor Penguji / Co Promotor 2 Penguji Penguji Penguji Eksternal Penguji Eksternal
----	-------------------------------	----------------------	-------------------------------	--	--	---

Mengetahui,
 Direktur Program Pascasarjana
 Universitas Kristen Indonesia

Ketua Program Studi Hukum
 Program Doktor

Prof. Dr. dr. Bernadetta Nadeak, M.Pd., PA.
 NIP. 014730320116402

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
 NIP. 0169019990463325

Catatan:

- Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka
- Dresscode:
 Penguji : Baju Toga lengkap
 Peserta Ujian : Jas dan kemeja putih berdas

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai setiap langkah, gerakan, ucapan, dan pikiran dari Sang Pengasih sumber segala ilmu pengetahuan dan karna Dialah Disertasi ini dengan judul “Kedudukan Kreditor Yang Memiliki Hak Eksekusi Perdata Dalam Pelaksanaan Perdamaian Yang Dihomologasi Untuk Restrukturisasi Pembangunan Hukum Kepailitan Indoneisa” dapat diselesaikan oleh penulis. Penulisan disertasi ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar keilmuan Strata-3 Doktor di bidang ilmu hukum yang diselenggarakan oleh program pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Jakarta.

Dalam kerangka menegakan keadilan dan menempatkan keadilan itu sendiri dibutuhkan bukan hanya dari regulasi tapi juga dibutuhkan sejauh mana perhatian dan konsistensi kita dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan didalam masyarakat. Kedudukan kreditor sebagaimana asas hukum yang berlaku yakni *paritas creditorum* dan *pari passu pro rata parte* merupakan hak mutlak yang diperoleh oleh setiap kreditor dengan mana segala perhatian dan usaha baik jasa maupun produk yang telah diberikan untuk kesuksesan debitor dalam kebersinambungan usaha debitor sehingga penerapan asas-asas dalam hukum perlindungan para kreditor patut untuk dijaga dan ditegakan termasuk dalam hal implementasi pelaksanaan di lapangan, untuk menjadi perhatian kaum akademisi dan praktisi dalam melihat persoalan hukum dan perlindungan hukum bagi kreditor pada aspek *das sollen* dan *das sein*.

Selaku praktisi, penulis melihat dan merasakan keterbatasan sistem negara, sistem lembaga peradilan dan keterbatasan keterbukaan informasi yang sifatnya teknis dapat mengganggu asas *paritas creditorum* dan *pari passu pro rata parte* untuk terlaksana sebagaimana mestinya. Belum lagi kita jumpai perilaku dari debitor yang oleh karena adanya celah hukum yang lemah berupaya menghindari tanggung jawab kepada kreditor secara adil yakni penegakan asas *pari passu pro rata parte* dan *paritas creditorium*, sistem lembaga peradilan yang belum terintegrasi antara lembaga peradilan, belum adanya keterbukaan akses badan hukum atas piutang dan utang yang terjadi dari segi kegiatan usaha, ketidakmampuan negara untuk menyediakan sistem keterbukaan setiap badan hukum atas utang piutang secara

transparan, hakim pengawas, kurator, dan pengurus yang terbatas oleh karena sistem maupun regulasi itu sendiri. Secara keseluruhan hal tersebut menyebabkan penegakan keadilan untuk kesetaraan bagi kreditor mendapatkan haknya atas piutang yang diberikan kepada debitor terkendala, sehingga dibutuhkan untuk penegakan asas *paritas creditorium* dan *pari passu pro rata parte* dalam pembaharuan UU Kepailitan dan PKPU di Republik Indonesia.

Hal inilah yang digali dan diteliti oleh penulis dalam tulisan ini dengan tujuan agar praktisi hukum dapat mengemban pelaksanaan restrukturisasi utang kepada debitor seyogyanya dilakukan dengan baik dan benar dan dapat memberikan rasa keadilan dengan melibatkan semua *stakeholder* dalam kepailitan. Sangat banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan disertasi ini dan yang memberikan dukungan baik doa, moral, dan materiil. Sehingga, selesainya disertasi ini tidak terlepas dari arahan, bimbingan, dan bantuan semua pihak untuk menyelesaikan penelitian, penulisan serta penyelesaian Program Doktor Ilmu Hukum, untuk itu saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H., selaku ketua program studi doktor hukum UKI dan selaku ketua tim promotor yang telah berkenan meluangkan waktu meskipun dalam kesibukan yang tinggi masih menyempatkan diri untuk membimbing, memberikan arahan, dan pencerahan bagi penulis juga penyempurnaan disertasi ini.
2. Prof. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., M.B.A., selaku Rektor UKI dan co-promotor 1 (satu), selaku anggota tim promotor yang banyak memberikan masukan, arahan, dan pencerahan dalam penulisan ini.
3. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., selaku co-promotor 2 (dua) yang berkenan membagi ilmu dalam teknik penulisan yang penulisan yang baik dan benar.
4. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum UKI sekaligus sahabat dan rekan praktisi yang banyak memberikan masukan, pendapat bagi penulis dalam menulis disertasi ini.
5. Prof. M. Hadhi Shuban, S.H., M.H., selaku guru besar hukum kepailitan FH UNAIR yang berkenan memberikan masukan, arahan, dan bimbingan bagi penulis.

6. Dr. Soedeson Tadra, S.H., M.Hum., selaku ketua Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan rekan seprofesi yang banyak memberikan arahan dan masukan bagi penulis.
7. Dr. Resha Agriansyah, S.H., M.H., selaku sahabat dan rekan seprofesi yang memberikan banyak arahan dan masukan bagi penulis
8. Prof. Dr. Jimmly Asshidiqie, selaku mentor di Perhimpunan Profesional Likuidator Indonesia.
9. Para Pengajar di Program Studi Doktor Ilmu Hukum UKI.
10. Teman-teman Program Studi Doktor Ilmu Hukum UKI angkatan ke-3 tahun 2021.
11. Para Staff Administrasi di Program Studi Doktor Ilmu Hukum UKI.
12. Para Partners, Asisten, dan Advokat pada kantor Vox Veritas Counselor at Law yaitu Ali Riza, Bastian Sihombing, Budi Salim, Denas Pamungkas, Prayogo, Safiq, Jamenra Sitorus, Irwan, Andi, Alif, Sandy Tanggono, dan Vrancessco Jefta.
13. Kedua orang tua penulis, Kasman Hutabarat (almarhum) dan Sontiner Pakpahan, yang selalu mendorong anak-anaknya untuk menimba ilmu.
14. Kedua mertua penulis yaitu Anggiat Lubis dan Rosalina Hutabarat yang selalu memberikan dorongan dan menyertai penulis dalam doa.
15. Yang sangat istimewa, istri penulis, Diana Angriani Serepina Lubis, anak-anak penulis yang tersayang, Andreaz Dixon Ondo Hutabarat, Dominique Aveline Hutabarat, dan Dhrevanya Diazteny Hutabarat, yang memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis, sudi kiranya penulisan dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Jakarta, 1 November 2024
Penulis,

Azet Hutabarat



Daftar Isi

Persetujuan Tim Promotor	i
Lembar Persetujuan Tim Promotor	ii
Lembar Persetujuan	iii
Pernyataan Orisinalitas	iv
Abstrak.....	v
<i>Abstract</i>	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xi
Daftar Singkatan	xiii
Daftar Tabel	xiv
 BAB I Pendahuluan	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	21
C. Rumusan Masalah	23
D. Tujuan Penelitian.....	24
E. Kegunaan Penelitian.....	25
F. Kerangka Pemikiran.....	26
G. Metode Penelitian	54
 BAB II Lembaga Kepailitan Dan Asas Eksekusi Bidang Perdata	 68
A. Pancasila Sebagai Sumber Segala Hukum	68
B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Kepailitan.....	78
C. Pengertian Kepailitan	95
D. Tujuan Hukum Kepailitan.....	99
E. Fungsi Kepailitan	106
F. Asas-Asas Hukum umum Dalam Hukum Kepailitan	110
G. Kurator	135
H. Hakim Pengawas	137
I. Eksekusi Putusan Perdata.....	140
J. Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	143
K. Daya Mengikat Sita, Mengesampingkan Sita dan Eksekusi Lain	148
L. Kekuatan Eksekutorial Terhenti Dengan Pernyataan Pailit	149

BAB III IMPLEMENTASI TUGAS PIHAK-PIHAK DALAM HUKUM KEPAILITAN UNTUK MENJALANKAN HUKUM ACARA KEPAILITAN	153
A. Kronologis Kasus Coal & Planning and Mining Corporation	153
B. Kewenangan Pihak-Pihak Pelaksana Hukum Acara Kepailitan	207
C. Permasalahan Pihak-Pihak Sesuai Dengan Kinerja Dalam UU KPKPU	233
 BAB IV UPAYA HUKUM KREDITOR PEMEGANG PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERADAP SIFAT LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS HUKUM KEPAILITAN	245
A. Kedudukan dan Upaya Hukum Kreditor Yang Tidak Masuk Dalam Putusan Perdamaian Yang Telah Dihomologasi	245
B. Kreditor Yang Memiliki Putusan Hakim Dari Pengadilan Negeri Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Rangka Pemenuhan Haknya Dapat Melakukan Eksekusi Terhadap Aset Debitor	285
C. Tritunggal Asas Utama Hukum Kepailitan Sebagai Landasan Utama Hukum Kepailitan Dalam Konteks Eksekusi Keperdataan	299
D. Permasalahan Kreditor Yang Memiliki Putusan <i>In Kraacht van Gewijde</i> Perdata Terhadap Pemenuhan Haknya Terhadap Harta Pailit	306
E. Kedudukan Asas Hukum <i>Lex Specialis Derogate Legi Generally</i> Dalam Hukum Perdata	310
F. Analisis Kreditor Pemegang Kekuatan Hukum Tetap Menggunakan Pisau Analisis ..	325
G. Teori Kreditor <i>Superspecialis</i>	370
H. Keadaan <i>Automatic Stay</i> Sebagai Implementasi Sistem Terintegrasi	385
 BAB V Penutup	398
A. Kesimpulan	398
B. Saran	405
 Daftar Pustaka	408
Daftar Riwayat Hidup	427

DAFTAR SINGKATAN (Akronim)

BPUI	Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PERSERO)
BW	<i>Burgerlijke Wetboek</i>
CPM	Coal & Planning and Mining
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
Fv	<i>Failissement Verordening</i>
GLL	Gugatan Lain Lain
HIR	<i>Herzienne Indonesisch Reglement</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
K	Kasasi
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Perppu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
L.N.R.I	Lembaran Negara Republik Indonesia
PK	Peninjauan Kembali
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PN	Pengadilan Negeri
PT	Pengadilan Tinggi
PT PEP	PT Polysindo Eka Perkasa
RBg	<i>Rechtglement Voor De Buitengewesten</i>
Rv	<i>Reglement op de Rechtsvordering</i>
Stb	<i>Staadblad</i>
TAP MPR	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
UU KPKPU	Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
USD	<i>United States Dollar</i> / Dollar Amerika
VOC	Srikat
WvK	<i>Vereenigde OosIndische Compagnie</i> <i>Wetboek Van Koopandhel</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Upaya Hukum Perdata dan Kepailitan



ABSTRAK

- Judul Disertasi : Kedudukan Kreditor Yang Memiliki Hak Eksekusi Perdata Dalam Pelaksanaan Perdamaian Yang Dihomologasi Untuk Restrukturisasi Pembangunan Hukum Kepailitan Indoneisa
- Kata Kunci : Kepailitan, Perdamaian, Homologasi, Eksekusi Putusan, Acara Perdamaian Kepailitan

Pada hakikatnya setiap utang harus dibayar, terhadap utang yang jatuh tempo maka pelaksanaan eksekusinya dapat dilakukan atas permohonan para kreditor melalui proses kepailitan. UU Kepailitan memberikan kesempatan untuk diajukannya perdamaian yang menjadi Solusi agar debitur diberi kesempatan untuk menyelesaikan semua piutang secara bertanggung jawab. Salah satu persoalan hukum dalam pelaksanaan hukum kepailitan terjadi dalam rangka upaya hukum perusahaan Coal Planning and Mining Corporation dalam menuntut haknya atas utang yang harus dibayarkan PT Polysindo Eka Perkasa. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai kedudukan dan upaya hukum kreditor yang tidak masuk dalam putusan perdamaian yang telah homologasi dalam kerangka Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dan kreditor yang memiliki putusan hukum dari pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap dalam rangka pemenuhan haknya dapat melakukan eksekusi terhadap aset debitur, pihak-pihak yang ada sebagai pelaksana (Kreditor, Debitur, Debitur Pailit, Hakim Pengawas dan Kurator) hukum acara Kepailitan telah bekerja sesuai prinsip-prinsip hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi semua kreditor secara adil untuk mendapatkan pemenuhan haknya sebagaimana prinsip *paritas creditorium* dan prinsip-prinsip hukum lainnya yang diakui dan berlaku dalam KUHP, dan Apakah asas hukum *lex specialis derogate lex generally* tidak lagi berlaku/berakhir, setelah putusan perdamaian yang homologasi diterima dan kepailitan dinyatakan berakhir, meskipun pelaksanaan dari isi akta perdamaian yang telah homologasi masih berjalan untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditor. Pada penelitian ini digunakan 3 (tiga) teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu teori negara kesejahteraan (*welfare state*), Teori Keadilan, dan Teori Hukum kepailitan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*) dan Pendekatan Filosofis (*philosophical approach*). Data yang digunakan adalah data primer dan data Sekunder. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data Preskriptif dan teknik analisis studi kepustakaan (*law in books*).

Penelitian ini bertujuan untuk menyimpulkan Kedudukan dan upaya hukum kreditor yang tidak masuk dalam putusan yang telah homologasi dalam kerangka UU KPKPU berlandaskan *paritas creditorium* adalah sama, serta pihak-pihak yang ada sebagaimana hukum acara kepailitan telah bekerja sesuai prinsip-prinsip hukum perlu menjadi suatu upaya untuk evaluasi bagi para pihak-pihak dalam hukum kepailitan. Asas hukum *lex specialis derogate legi generali* tidak lagi berlaku/berakhir setelah putusan perdamaian yang homologasi dan kepailitan berakhir merupakan suatu ketentuan dalam hukum kepailitan dimana kondisi kepailitan akan berakhir apabila perjanjian perdamaian telah disepakati dan homologasi.

ABSTRACT

Disertation Title : *The Position of Creditors with Execution Rights in the Implementation of Homologated Settlement in the Restructuring of Bankruptcy Law in Indonesia.*
Keywords : *Bankruptcy, Settlement, Homologation, and Execution of Judgment*

Essentially, every debt must be paid, and for debts that have matured, execution can be carried out at the request of creditors through the bankruptcy process. The Bankruptcy Law provides an opportunity to propose a settlement, which serves as a solution for the debtor to be given a chance to responsibly settle all debts. One of the legal issues in the implementation of bankruptcy law arose from the legal actions of the Coal Planning and Mining Corporation in pursuing its rights over the debt that must be paid by PT Polysindo Eka Perkasa. The problem in this research concerns the position and legal remedies of creditors who were not included in the homologated settlement decision within the framework of the Bankruptcy and PKPU Law, and creditors who have a final and binding legal decision from the district court in order to fulfill their rights by executing the debtor's assets. The parties involved, such as the creditor, debtor, bankrupt debtor, supervising judge, and curator, in the bankruptcy proceedings have acted in accordance with legal principles and provided legal protection for all creditors fairly in order to fulfill their rights, in line with the principle of *paritas creditorium* and other legal principles recognized and applicable in the Civil Code (KUHP). This research also questions whether the legal principle *lex specialis derogat lex generali* no longer applies/ends after the homologated settlement is accepted and the bankruptcy is declared over, even though the execution of the contents of the homologated peace agreement is still ongoing to fulfill the debtor's obligations to the creditors. In this study, three theories are used as analytical tools: the welfare state theory, the theory of justice, and the theory of bankruptcy law.

This research is a normative-empirical legal study with a Statute Approach, Case Approach, Conceptual Approach, Comparative Approach, and Philosophical Approach. The data used includes primary and secondary data. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources. The analysis techniques applied in this research are prescriptive data analysis and library study analysis (law in books).

This research aims to conclude the position and legal remedies for creditors not included in a court decision that has been homologated within the framework of the Bankruptcy Law (UU KPKPU), based on the principle of "*paritas creditorium*" (equal treatment of creditors). Additionally, it seeks to evaluate whether the parties involved, as stipulated by bankruptcy procedural law, have acted in accordance with legal principles, which should serve as an evaluation effort for the parties in bankruptcy law. The legal principle of *lex specialis derogat legi generali* no longer applies/ends after the homologated peace agreement and the conclusion of the bankruptcy, as stipulated in bankruptcy law. Bankruptcy is considered resolved when the peace agreement has been reached and homologated